

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menurut Somantri (2001: 44) tujuan dari pendidikan IPS pada tingkat sekolah, yaitu: 1) menumbuhkan nilai kewarganegaraan, moral, ideologi negara dan agama; 2) menekankan isi dan metode berpikir ilmuwan; serta 3) menekankan pada *inquiry*. Salah satu tujuan yang terdapat dalam pendidikan IPS yaitu menumbuhkan nilai kewarganegaraan, moral dan ideologi negara dalam hal ini dapat diwujudkan dengan menjadi warga negara yang demokratis.

Tujuan pendidikan IPS berkaitan pula dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 bahwa:

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai anggota masyarakat suatu bangsa dan negara, menjadi warga negara yang demokratis adalah keharusan bagi setiap individu. Masing-masing individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Kehidupan masyarakat yang demokratis ialah memandang bahwa setiap warga negara mempunyai tingkat kesetaraan yang sama, tidak membedakan

latar belakang sosial dan saling toleransi antar warga negara. Terwujudnya nilai-nilai demokrasi ini merupakan salah satu cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak luput dari pelanggaran yang terkait pada pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Menurut Kladen (2014) menyebutkan beberapa pelanggaran yang terjadi terkait dengan pelanggaran nilai-nilai demokrasi yaitu tindakan diskriminasi pada suatu oknum tertentu (pelanggaran HAM), kebebasan berekspresi, tindakan kekerasan, adanya geng klithih, kasus pemilu dan tindakan intoleran (Kompas.com). Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, akan tetapi dilakukan pula oleh elit-elit pemerintahan serta aparat penegak hukum. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat belum mewujudkan nilai-nilai demokrasi pada kehidupannya.

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mampu bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, salah satunya diupayakan melalui proses pendidikan. Upaya tersebut dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sebuah pendidikan yang dilaksanakan secara demokrasi pada lingkungan sekolah akan mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik dan berperan dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis.

Dalam dunia pendidikan pelanggaran nilai-nilai demokrasi masih terjadi. Hal tersebut diungkapkan menurut Danajaya (2012) bahwa berbagai tindakan meliputi kekerasan terhadap anak, perkelahian antar pelajar

(tawuran), perundukan pada siswa (*bullying*), serta interaksi antara guru dan peserta didik yang tidak wajar dalam proses belajar mengajar yang tidak baik menjadikan reformasi pendidikan dikhianati (edukasi.kompas.com). Berdasarkan peristiwa diatas, dalam hal ini diperlukan upaya pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada siswa dalam proses pembelajaran.

Adisusilo (2013: 62) menjelaskan bahwa pendidikan nilai mengantarkan siswa untuk mengenali dan menerapkan nilai. Dewasa ini dalam pelaksanaannya pendidikan nilai baru dilaksanakan pada tataran mengetahui nilai, belum sampai dilaksanakan pada tindakan nilai dimana dalam hal ini langkah yang penting adalah pada tindakan nilai. Pendidikan nilai harus terintegrasi dalam semua mata pelajaran, seperti pada nilai demokrasi.

Salah satu mata pelajaran yang relevan untuk diterapkan nilai-nilai demokrasi menurut Zamroni (2007: 65) adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Melalui mata pelajaran IPS siswa diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, tanggung jawab, dan menjadi warga dunia yang cinta damai.

Hal tersebut dijelaskan pula oleh Rahmah (2014: 107) bahwa peran penting pembelajaran IPS yaitu membangun identitas nasional serta menjadikan siswa yang kreatif, mampu memecahkan masalah diri dan lingkungannya serta menjadi warga negara yang baik dan bermoral. Terciptanya warga negara yang memiliki kompetensi dalam hal

pengetahuan, proses intelektual dan karakter yang demokratis diperlukan keterlibatan aktif siswa dalam menanamkan pada nilai-nilai demokrasi maupun ide-ide demokrasi dalam proses pembelajaran, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek pengetahuan.

Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah adalah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan sosial yang berisikan konsep pengalaman belajar yang diorganisir dalam ilmu sosial secara psikologis dan ilmiah. Secara akademis akan mengantar siswa menjadi warga negara yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional, dalam menciptakan sistem sekolah yang dapat mendidik dan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki kepedulian sosial dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakatnya (*the public good citizenship*) (Wahidmurni, 2017: 18).

SMP Negeri 13 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang mempunyai visi dan misi yaitu menciptakan manajemen partisipasi pada seluruh warga sekolah dan menyelenggarakan proses pembelajaran secara efektif dan aktif. Adapun prinsip yang ada pada nilai-nilai demokrasi adalah partisipasi pada seluruh pihak dan menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan aktif.

SMP Negeri 13 Yogyakarta memiliki misi untuk menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah. Partisipasi merupakan salah satu nilai dalam nilai-nilai demokrasi, salah satu cara yang digunakan adalah

dengan mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam pembelajaran. Oleh karenanya peneliti bermaksud untuk mengetahui integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih adanya pelanggaran nilai-nilai demokrasi pada kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Masih adanya pelanggaran nilai-nilai demokrasi pada jenjang pendidikan.
3. Belum maksimalnya peranan pendidikan nilai yang dilaksanakan di sekolah karena pendidikan nilai baru dilaksanakan pada tataran mengetahui nilai, belum sampai pada tataran dilaksanakan tindakan nilai.
4. Tujuan pembelajaran IPS adalah mengantarkan siswa menjadi warga negara yang baik dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi, akan tetapi lebih menekankan pada aspek pendidikan kognitif.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada potensi IPS dalam menanamkan nilai demokrasi pada proses pembelajaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta ?
2. Apa saja nilai-nilai demokrasi yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS.
2. Nilai-nilai demokrasi yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran IPS.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh pengetahuan mengenai integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 13 Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran IPS yang ada pada SMP Negeri 13 Yogyakarta.

b. Bagi Sekolah

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada sekolah dan guru dalam integrasi nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran IPS.

